

**PENGARUH TINGKAT KOMPETENSI PEGAWAI  
DAN KEPATUHAN ATURAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**FAREKHA**

**NIM : 4318091**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**PENGARUH TINGKAT KOMPETENSI PEGAWAI  
DAN KEPATUHAN ATURAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**FAREKHA**

**NIM : 4318091**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Farekha**

NIM : **4318091**

Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Kompetensi Pegawai dan Kepatuhan Aturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 April 2022  
Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
10000  
D000AJX767234186  
**Farekha**  
4318091

## NOTA PEMBIMBING

**Ade Gunawan, M.M**  
Jl. Pahlawan No. 52 Kajen, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Farekha

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

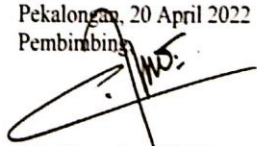
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Farekha**  
NIM : **4318091**  
Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Kompetensi Pegawai dan Kepatuhan Aturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 20 April 2022  
Pembimbing

  
**Ade Gunawan, M.M**  
NIP. 198104252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat: Jl Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan,  
[www.febi.iainpekalongan.ac.id](http://www.febi.iainpekalongan.ac.id), Email: [febi@iainpekalongan.ac.id](mailto:febi@iainpekalongan.ac.id)

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Farekha  
NIM : 4318091  
Judul Skripsi :  
Pengaruh Tingkat Kompetensi Pegawai dan  
Kepatuhan Aturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (Studi pada Organisasi Perangkat  
Daerah Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu-Kamis tanggal 18-19 Mei 2022 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

Ria Anisatus Sholihah, S.E., MSA, CA  
NIP. 198706302018012001

Penguji II

Wahid Wachvu Adi Winarto, M.Si  
NIP.198410312019081001

Pekalongan, 11 Mei 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Shinta Dewi Rismawati  
NIP.199502201999032001

iv

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Turmudi dan Ibu Abesah yang telah berjuang untuk membesarkan penulis sampai menjadi seperti sekarang.
2. Keluarga besar penulis kakak Muslikhin, Sofyan, Nasori, Busro, Sodikun, dan Sarokha yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi *support system* untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater saya jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

## **MOTTO**

“Kekuatan dan kepintaran adalah modal. Tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian dan ketekunan”.

(Merry Riana)

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain”.

(HR.Muslim)

## ABSTRAK

### **FAREKHA. Pengaruh Tingkat Kompetensi Pegawai dan Kepatuhan Aturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kabupaten Batang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kompetensi pegawai dan kepatuhan aturan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jenis penelitian berfokus pada penelian lapangan, metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Batang, menggunakan metode pertimbangan atau kriteria tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu organisasi pemerintah daerah kabupaten batang yang masuk dalam kriteria indikator peningkatan pemerintahan yang baik sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja kabupaten batang.

Dalam penelitian diperoleh sampel sebanyak 51 responden. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, normalitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, analisis uji hipotesis, dan koefisien determinan dengan bantuan alat SPSS 23. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat kompetensi pegawai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian untuk kepatuhan aturan secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata kunci :** Tingkat Kompetensi Pegawai, Kepatuhan Aturan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



## **ABSTRACT**

### **The Influence of Employee Competency Levels and Regulatory Compliance on Performance Accountability of OPD Government Agencies in Batang Regency.**

This study aims to determine the effect of employee competency level and regulatory compliance on the performance accountability of government agencies. This type of research focuses on Field Research, the method of this research approach uses quantitative methods. This research was conducted at the OPD of Batang Regency, using the Purposive Sampling method. The population in this study is the Batang Regency local government organization which is included in the criteria for improving good governance indicators as stated in the Batang Regency performance accountability report.

In the study obtained a sample of 51 respondents. Testing in this study uses descriptive statistics, validity, reliability, normality, classical assumptions, multiple linear regression, hypothesis testing analysis, and determinant coefficients with the help of SPSS 23. The results of the study prove that the level of employee competence partially has a significant effect on agency performance accountability. government. Then for partial rule compliance also has a significant effect on the performance accountability of government agencies.

**Keywords:** Employee Competency Level, Compliance with Regulations, Performance Accountability of Government Agencies.

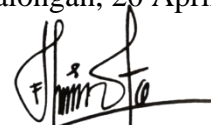
## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
3. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan, sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ria Anisatus Sholihah, MSA., AK.,CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Alvita Tyas Dwi Aryani, S.E. M.Si., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moral
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap semua Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 April 2022



**Farekha**  
**4318091**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Landasan Teori .....	13
B. Telaah Pustaka .....	22
C. Kerangka Berfikir .....	29
D. Hipotesis .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Setting Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	33

E. Variabel Penelitian .....	37
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Metode Analisa Data.....	40
<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Responden Penelitian.....	45
B. Analisis Data .....	51
C. Pembahasan.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran 1 Permohonan Izin Penelitian.....	I
2. Lampiran 2 Surat Izin Penelitian OPD .....	II
3. Lampiran 3 Kuesioner Penelitian.....	III
4. Lampiran 4 Data Mentah Responden.....	IX
5. Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif.....	XVII
6. Lampiran 6 Uji Instrumen.....	XVIII
7. Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik .....	XX
8. Lampiran 8 Uji Regresi Linear Berganda .....	XXIII
9. Lampiran 9 Uji Hipotesis .....	XVIV
10. Lampiran 10 Tabel r.....	XXV
11. Lampiran 11 Tabel t.....	XXVII
12. Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	XXIX

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

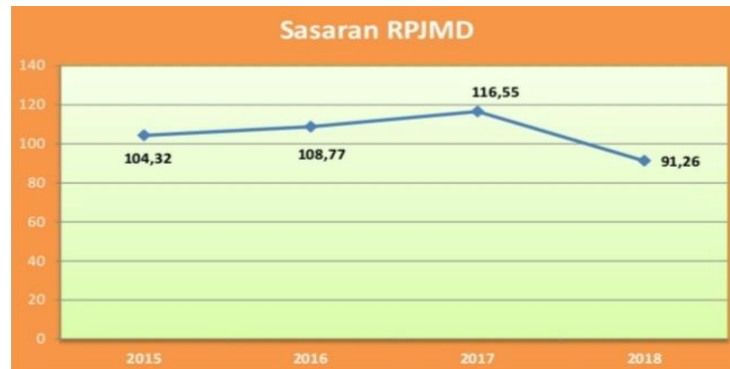
Munculnya perkembangan orientasi manajemen berbagai makna akuntabilitas telah muncul. Dari sudut tata pemerintahan yang baik, pemerintahan tidak hanya berupaya untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga hubungannya dengan masyarakat dan warga negaranya. Dalam konteks hubungan Negara dan warga negara, warga negara seharusnya tidak hanya dianggap sebagai konsumen produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga warga negara yang memiliki hak atas pemerintahannya. Hak untuk menilai semua tindakan pemerintah, warga negara juga harus menghormati keinginan pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien untuk menjalankan aktivitasnya (Rusdiana, 2018).

Kebutuhan akan akuntabilitas meningkat tajam setelah masa reformasi. Tuntutan publik tidak hanya pelaporan keuangan, tetapi juga akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, tahun 1999 pemerintah menetapkan Keppres RI No. 07 kemudian memperbaharainya tahun 2014 No. 29 mengenai Tanggung Jawab Pemerintahan (LAKIP). Secara tidak langsung dan berkala lembaga publik harus membuat, menyunting, serta melaporkan kinerja laporannya. Maksud dan tujuan adanya laporan tersebut agar memberikan informasi mengenai *output* lembaga atau instansi pada periode berjalan sehubungan adanya kemajuan dalam

mencapai tujuan dan sarannya. Instansi pemerintah yang berlaku wajib melaporkan serta mempertanggungjawabkan capaian keberhasilannya dalam LAKIP. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas guna memberikan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan program. (Rusdiana, 2018)

Berdasarkan hasil nilai capaian kinerja pada RPJMD Jawa Tengah lima tahun terakhir, dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2018 hasil kinerja secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 7 misi, 28 tujuan dan 38 sasaran yang diukur dengan 66 Indikator Kinerja, untuk capaian kinerja sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan misi RPJMD rata-rata tercapai sebesar 91,26% atau kategori “Baik”. Secara rinci dapat dijelaskan *output* terhadap ukuran kinerja 38 target Provinsi Jawa Tengah berkesimpulan terdapat 14 target (36,84%) tercapai dengan dikategorikan "Sangat Baik", 14 Sasaran Strategis (36,84%) tercapai dengan kategori "Baik", dan 2 Sasaran Strategis (5,26%) tercapai dengan kategori "Cukup Baik" dan 7 Sasaran Strategis (18,42%) kategori “Kurang Baik” atau masih belum tercapai. Dibawah ini grafik progres pencapaian target kinerja sasaran pada RPJMD 2015-2018.

Gambar 1.1  
Progres Pencapaian Target Kinerja Sasaran Pada RPJMD 2015-2018



Sumber: LKJIP Provinsi Jawa Tengah 2018

Dilihat dari grafik tersebut, hasil ini merupakan representasi dari kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah, Setda, Sekretariat, DPRD yang telah membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah tertuang pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 tentang perubahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Grafik tersebut menunjukkan penurunan di tahun 2015 dikarenakan terjadi perubahan kualitas dan kuantitas Indikator Kinerja Sasaran (LKJIP, 2018).

Menurut laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten Batang atas realisasi penentuan kinerja periode 2018, pemerintah kabupaten Batang menunjukkan kinerja dengan rata-rata prosentase 108,97. Hasil tersebut dapat tercapai karena adanya penetapan 25 sasaran strategis sebelumnya. Mencermati *output* analisis pencapaian tersebut juga masih terdapat hambatan yang memerlukan upaya serta komitmen untuk menaikkan kinerja dengan maksud agar penetapan kinerja yang sudah direncanakan

bisa terealisasi dengan baik. Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten Batang terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan kurangnya efisien dan efektivitas dalam penyampaian misi pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya keadaan ini juga meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik kepada pemerintah (Pemda, 2018).

Akuntabilitas yang andal memuat keterangan yang akurat, handal, dan valid dimana laporan tersebut dapat mendeskripsikan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pengendalian penggunaan sumber daya oleh badan nasional yang relevan. Akuntabilitas pemerintah yang kuat memerlukan dukungan badan pemerintah yang kompeten atau berkualitas, partisipasi publik, dan unsur pengawasan dan audit profesional. Penerapan sistem tersebut harus menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif serta efisien, bertanggung jawab timbulnya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian akuntabilitas wajib dimaknai menjadi bentuk responsif, responsibel, transparan, bisa dikontrol, dan *liability* (Kusumasari Bevaola, 2014).

Kesuksesan tercapainya sasaran ditentukan oleh kinerja organisasi yang dihasilkan. Kinerja merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan suatu aktivitas, rencana, visi dan misi organisasi. Berhasilnya organisasi disebabkan oleh kinerja masing-masing pegawai. SDM saat ini tidak menjamin kompeten, sehingga pejabat pemerintah perlu lebih memperhatikan mereka yang bekerja. Kinerja karyawan adalah



tolok ukur lembaga terkait untuk menilai produktivitas dan memberikan informasi kepada karyawan (Rosmaini, 2019 ).

Kinerja adalah transparansi keadaan yang dikomunikasikan suatu pihak agar memperoleh informasi tentang capaian output kelembagaan terkait dengan visi dan untuk memahami dampak dari aturan operasional yang ditetapkan. Berdasarkan informasi tentang kegiatan organisasi, tindakan yang diperlukan seperti penyesuaian kebijakan dan deskripsi kegiatan utama organisasi serta tugas utama diambil sebagai dasar untuk merencanakan dan menentukan tingkat keberhasilan (Pemda, 2018).

Di era globalisasi, peningkatan jumlah SDM untuk pembinaan menjaga daya saing serta kemandirian menjadi syarat utama. Hal itu sejalan dengan konteks pembangunan pemerintahan ke depan adalah perangkat Negara dan bangsa yang profesional yang mampu bersaing dan memprediksi pesatnya perkembangan global di berbagai aspek kehidupan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Rendahnya kompetensi pegawai pemerintah daerah mengurangi akuntabilitas kinerja, meningkatkan risiko investasi, dan mengurangi daya saing dan efektivitas. (Rosmaini, 2019 )

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Jenjang Sekolah PNS**

Status	Pendidikan											
	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	Sar mud	S1	S2	S3	JML
PNS	200	219	1045	23	298	885	8	49	3039	409	1	6230

Sumber : LAKIP Kabupaten Batang 2018

Saat ini telah disahkan tiga undang-undang utama bidang perbendaharaan, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Perkembangan hukum dan akuntansi terkait erat. Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dimilikinya, terlepas dari apakah negara yang bersangkutan adalah hukum perdata atau hukum umum. Di bawah hukum perdata, semua kegiatan didasarkan pada aturan hukum, termasuk aturan pertanggungjawaban yang terakumulasi dalam undang-undang, yang cenderung sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, semua aktivitas hukum umum didasarkan pada perjanjian politik yang dibuat atas dasar kasus per kasus. Instansi pemerintah bebas menggunakan standar apapun, secara umum dapat diterima. Akuntan publik menganut sistem hukum perdata, yaitu sistem yang memuat segala aturan yang terkait dengan akuntan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (Astami, 2018).

Selain itu Sholikhin, (2016) berpendapat bahwa implementasi akuntabilitas itu sendiri harus didukung oleh undang-undang dan peraturan yang sesuai, dan kepatuhan terhadap implementasi kelembagaan seperti penerapan sistem kompensasi dan hukuman yang konsisten dan bentuk pelaporan akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, kepatuhan hukum juga merupakan kriteria keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bukti penelitian tentang tingkat kompetensi dan taat aturan hukum dapat ditemukan pada penelitian Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan Pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (*Empirical Study On the regional work units Pekan baru*) sampai pada kesimpulan bahwa kapasitas dan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaporan pemerintah (Egrinaen Mauliziska, 2015). Hal ini juga dapat diperkuat dengan riset yang judulnya Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kota Pekanbaru), menyimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja lembaga publik (Zulharman, 2015).

Meskipun telah banyak penelitian tentang akuntansi sektor publik, kenyataannya masih banyak penyelewengan. Tentu saja hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga publik, sehingga pemerintah terkait harus dapat mengambil masalah ini sebagai pelajaran dalam memberikan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Dengan pemaparan tersebut, penulis ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dan ingin melihat sejauh mana implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, serta kepatuhan undang-undang mempengaruhi laporan pertanggungjawaban lembaga publik dengan pengembangan variabel pemahaman akuntansi dengan tingkat kompetensi pegawai.

Berdasar paparan yang telah dijelaskan, penulis tertarik melakukan penelitian pada pemerintah daerah, studi kasus OPD Kabupaten Batang dengan judul penelitian **“Pengaruh Tingkat Kompetensi Pegawai dan Kepatuhan Aturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang)**. Dalam hal tersebut peneliti memiliki tujuan agar mengetahui dan melihat sejauh mana tingkat pengaruh kompetensi pegawai dan kepatuhan aturan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Batang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, mulai dari meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat, hasil nilai capaian

kinerja RPJMD Jawa Tengah yang menunjukkan penurunan dikarenakan terjadi perubahan kualitas dan kuantitas indikator kinerja sasaran (LKJIP, 2018). Kemudian berdasar laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Batang terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja yang menyebabkan kurangnya efisien dan efektivitas dalam penyampaian misi pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu meski telah banyak penelitian terdahulu tentang akuntansi sektor publik, realitanya masih banyak penyelewengan. Keadaan ini juga meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik kepada pemerintah. Dari beberapa alasan tersebut, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah Tingkat Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah Kepatuhan Aturan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh tingkat kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk menguji pengaruh kepatuhan aturan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil studi harus menjadi dasar pemikiran ilmiah guna kemajuan ilmu akuntansi sektor publik khususnya dari sudut pandang pemerintah. Diharapkan temuan ini dapat dijadikan referensi oleh mereka yang secara khusus tertarik dalam penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi sektor publik serta dapat bermanfaat bagi pembaca dengan menambahkan literatur perpustakaan.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini secara khusus, diharapkan memiliki manfaat oleh pemangku kepentingan, yaitu :

- a. Khususnya untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, harapan penulis studi ini berguna dalam meningkatkan ilmu pengetahuan serta benar-benar bisa menunjang kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.
- b. Bagi lembaga publik, semoga hasil studi ini bisa menjadi dasar pengevaluasian untuk menambah informasi dan tanggung jawab atas kerja lembaga publik.
- c. Bagi Penulis, riset ini dapat digunakan sebagai bentuk pengalaman dan implementasi ilmu yang telah didapat selama dibangku perkuliahan. Dengan penelitian ini, peneliti juga dapat mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh tingkat kompetensi pegawai,

partisipasi masyarakat, dan kepatuhan aturan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan penelitian. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab kepenulisan yang setiap babnya terdapat sub bab untuk lebih detail. Rangkaian dari bab awal sampai terakhir merupakan hal yang keterkaitan.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada awal terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang terbagi kedalam lima sub-bab.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Pada bagian kedua terdiri dari empat sub bab yang berisikan landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka pikir serta hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ketiga metodologi penelitian terdapat sub bab yang berisi tentang jenis, pendekatan, kerangka penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, sumber, alat, teknik pengumpulan dan analisis data.

#### **BAB IV : ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN**

Bagian empat meliputi gambaran data, analisis, temuan penelitian, serta hasil pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian lima adalah bagian akhir, didalamnya meliputi simpulan serta saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil perolehan data dan uraian pembahasan penelitian yang tertuang pada skripsi ini, dapat ditarik simpulan :

1. Secara parsial variabel Tingkat Kompetensi Pegawai berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kabupaten Batang. Hal tersebut dibuktikan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel, serta taraf signifikansinya yaitu  $t$  hitung  $2,534 > t$  tabel  $2,011$ , dan mempunyai nilai signifikan  $0,015$  lebih kecil dari  $0,05$ .
2. Secara parsial Variabel kepatuhan aturan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kabupaten Batang. Hal tersebut dibuktikan dengan perbandingan nilai  $t$  hitung  $6,628 > t$  tabel  $2,011$ , dan mempunyai nilai signifikan  $0,000$  lebih kecil dari  $0,05$ .

#### **B. Saran**

OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan serta mempertahankan kemampuannya melalui pemberian pelatihan bagi pegawainya. Instansi didorong agar dapat mewujudkan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian, untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan inovasi terhadap variabel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmawanti Dwi,dkk. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Portal garuda journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol 5 No.1, e-ISSN: 2548-9925.
- Agus, Irianto. (2004). *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Astami Putri, Chaira. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *Jurnal JOM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Palembang*, Volume 2.
- Bayu Fajar p. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *Jurnal Imiah Universitas Negeri Semarang*.
- H. Nizar. (2021). *Buku Saku Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sub Bagian Asesmen Pegawai Bagian Asesmen Dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
- Bastian, I. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Bevaola Kusumasari. (2015). *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Dewata Evada, dkk. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan,Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 8 No.3, e-ISSN : 541-550.
- Fitriyani N, Helmi H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Unihaz..* Vol.1 No.2. ISSN: 2620 – 8555.
- Egrinaen Mauliziska, dkk,. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru Indonesia, Vol. 2 No. 2.

Gede AS, Ni Ketut R, dkk. (2015). Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 571-598. ISSN : 2337-3067.

Hasibuan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

<https://ppid.jatengprov.go.id/laporan-akuntabilitas-kinerja-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-lkjip/>

<https://batangharikab.bps.go.id/statictable/2018/08/29/150/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-batang-hari-2017>.

<http://bpkpad.batangkab.go.id/ppid/>

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Karima, Dina, dkk. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *E-JRA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Malang*, Vol.10, No.6.

Muhidin, Sambas Ali. (2007). *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Jalur Dalam Penelitian*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.

Maslich, Esha, dkk. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal E-JRA*. Vol.09 No.10.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2018).

- Putri, Egrinaen. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *Jurnal JOM Fekon*. Vol.2 No. 2.
- Rahayu, Sulindawati, dkk. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm), Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Journal SI Akuntansi*, Vol.2, No.1.
- Rusdiana, Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Septiyani, Julita. (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan. *Jurnal Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.2, ISSN 2721-1819.
- Sumiyati, 2012. Pengaruh penerapan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP), SKPD Kabupaten Siak. Universitas Riau
- Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabet.
- Syofian Siregar, Syofian. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan SPSS*, Ed. I, Cet.2. Jakarta: Kencana.
- Zulharman, Khodri. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Fakultas Ekonomi JOM FEKON*. Vol.2 No.2.